

# Mengenang Tragedi Mei 1998, Memahami Masa Kini, dan Merancang Hari Depan yang Lebih Baik

Drs Eddie Lembong, Apt\*\*\*

## Pengantar: Tragedi Mei 1998 dalam Perspektif Komparatif

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terimakasih atas kehormatan dari panitia untuk menyampaikan tema ‘Menuju Indonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi (dalam rangka memperingati 10 tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998).’ Tanpa terasa Tragedi Mei 1998 sudah sepuluh tahun berlalu. Dalam satu dasawarsa terakhir ini telah banyak pula terjadi peristiwa yang memberi harapan pada eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia yang akan saya uraikan nanti. Maka disamping mengenang korban-korban tragedi tersebut, kita harus berani melihat tragedi tersebut dengan lebih jernih demi masa depan kita yang lebih baik.

Selanjutnya ijinkanlah saya menyinggung sepintas mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh Huru-hara Mei 1998. Peristiwa ini sering disebut sebagai tragedi terdahsyat dalam sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Seorang penulis Indonesia menyebutnya “titik terendah sejarah orang etnis Cina di Indonesia.”<sup>1</sup> Walaupun etnis Tionghoa menjadi korban, namun haruslah diingat bahwa Tragedi Mei tidak hanya memakan korban dari etnis Tionghoa saja, namun banyak juga dari etnis lain.

Menurut laporan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), rentetan kerusuhan Mei 1998 terjadi di Jawa dan Sumatera, yang dimulai dari Medan (4-8 Mei), kemudian diikuti huru-hara di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Lampung, yang berkobar antara tanggal 13-15 Mei.<sup>2</sup> Pertama-tama harus diingat bahwa

Mendapatkan jumlah korban manusia yang tepat merupakan hal yang lebih sulit lagi dibandingkan mendapatkan angka kerusakan dan kerugian. Secara logis seharusnya tidak demikian, karena korban jiwa lebih mudah terpantau dari laporan yang diberikan keluarga korban. Tetapi kenyataan menunjukkan hal berbeda. Berbagai versi yang dipublikasikan menunjukkan jumlah yang berbeda bahkan jauh berbeda.<sup>3</sup>

---

\*\*\* Ketua Dewan Pendiri Yayasan Nabil (*Nation Building*) . Tulisan ini disusun dengan dibantu Didi Kwartanada (kandidat PhD), anggota Dewan Pakar Yayasan NABIL.

<sup>1</sup> René L. Pattiradjawane, “Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia”, dalam I.Wibowo (ed), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia* (Jakarta: Gramedia-Pusat Studi Cina, 2000), 213-252

<sup>2</sup> Upaya merekonstruksi berbagai kerusuhan di atas dapat dilihat dalam Ester Indahyani Jusuf, Hotma Timbul, Olisias Gultom, Sondang Frishka, *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa: Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Jakarta: SNB dan APHI, 2007), 34-47, 79-168.

<sup>3</sup> Ibid, 173

Jumlah korban jiwa terbesar ada di Jakarta, dengan taksiran antara 500-1300 jiwa.<sup>4</sup> Namun berapa diantara korban yang berasal dari etnis Tionghoa sulit diketemukan datanya. Disamping itu diperkirakan sekitar 92 (data Tim Gabungan Pencari Fakta)<sup>5</sup> hingga 152 (data Tim Relawan untuk Kemanusiaan)<sup>6</sup> perempuan menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual. Data korban jiwa di luar Jakarta tidak begitu jelas. Data yang ada hanyalah gabungan angka korban di Surakarta, Palembang, Lampung, Surabaya dan Medan, yakni sekitar 30 orang tewas, antara 74-131 orang terluka dan 27 orang terluka bakar.<sup>7</sup> Sekali lagi tidak jelas berapa jumlah korban yang berasal dari etnis Tionghoa. Adapun kerugian materi di Surakarta ditaksir sebanyak enam ratus milyar rupiah.<sup>8</sup> Sedangkan di Jakarta (termasuk Bekasi dan Tangerang) jauh lebih besar.<sup>9</sup> Ditaksir pula sekitar 70.000 orang etnis Tionghoa (kurang dari 2% dari total etnis Tionghoa) meninggalkan Indonesia.<sup>10</sup>

Perkiraan angka-angka yang dikutip di atas tadi cukup menggetarkan. Akan tetapi bila kita menengok kembali ke masa lalu, ternyata terjadi pula bermacam tragedi serupa dengan motif yang berbeda. Satu contoh adalah periode Revolusi Fisik 1945-1950. ketika golongan etnis Tionghoa mengambil posisi netral dalam konflik Indonesia-Belanda seperti nampak dalam tabel 1 berikut ini<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, 175-76. Perkiraan yang lebih besar dibuat oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Romo Sandyawan yang menyebut 2,244 korban jiwa. René L. Pattiradjawane, 'Peristiwa Mei 1998 di Jakarta', 231.

<sup>5</sup> Ester Indahyani Jusuf et al., *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa*, 177

<sup>6</sup> René L. Pattiradjawane, 'Peristiwa Mei 1998 di Jakarta', 246.

<sup>7</sup> Ibid, 230

<sup>8</sup> Mohamad Sobary dan Thung Ju-lan, 'Membangun Jaringan Sosial dari Bawah: Strategi Memecahkan Masalah Relasi Antar Etnis 'Pasca Kerusuhan' di Solo', dalam Tim Peneliti PMB LIPI, *Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas dan Konflik Sosial* (Jakarta: PPPKK LIPI, 1999), 192. Deskripsi mengenai kerusuhan 14 Mei 1998 di Surakarta bisa dilihat dalam Wasino, *Wong Jawa dan Wong Cina: Liku-liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998* (Semarang: Unnes Press, 2006), 68-74.

<sup>9</sup> Untuk berbagai data kerusakan materi di Jakarta dan sekitarnya lihat Ester Indahyani Jusuf et al., *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa*, 171-73.

<sup>10</sup> Ivan Wibowo, 'Catatan Editor', dalam Ivan Wibowo (ed), *COKIN: So What Gitu Loh! Pemikiran Tionghoa Muda* (Jakarta: Komunitas Bambu-Jaringan Tionghoa Muda, 2008), viii. Tentu tidak dilupakan juga adanya *capital flight* dalam jumlah yang cukup besar pada waktu itu.

<sup>11</sup> Bila kita menoleh lebih jauh lagi, bisa disebut 'Pembantaian 1740' (*de Chineezen Moord*), ketika sekitar 10,000 orang etnis Tionghoa di Batavia dibunuh oleh Belanda pada tahun 1740.

**Tabel 1. Estimasi Jumlah Korban Tionghoa dalam Beberapa Konflik Di Masa Revolusi Fisik 1945-1949**

Tanggal	Lokasi/Jenis Konflik	Korban/Kerugian Etnis Tionghoa
10/11/1945	Surabaya	1000 tewas dan 5000 luka
Mei-Juni 1946	Tangerang	653 tewas, 496 luka, 403 hilang, 3409 bangunan hancur
18/9/1946	Bagansiapi-api	239 tewas, 52 luka
1/1/1947	Palembang	256 tewas, 114 luka, 594 hilang, 3060 bangunan hancur
1947	Agresi Militer Belanda ke-I	100,000 pengungsi, 10,000 hilang, hampir 1000 tewas
1948-1949	Agresi Militer Belanda ke-II	Total 34,392 pengungsi; 4,557 hilang; 1,757 diculik; 359 dibunuh; 172 luka; 1,474 rumah dirampok; 2,331 rumah dibakar

Sumber: Didi Kwartanada, 'Minoritas Perantara, Loyalitas dan Kekerasan: Etnis Tionghoa di Masa Pergolakan Politik 1942-1949' (naskah, 2006), h.41.

Dari tabel 1, nampak bahwa Tragedi Mei 1998 bukanlah satu-satunya kerusuhan besar yang memakan korban dari etnis Tionghoa. Namun ia adalah bagian dari perjalanan panjang etnis Tionghoa dalam sejarah politik Indonesia, yang secara periodik diwarnai dengan huru-hara politik, khususnya di saat pergantian penguasa/rezim atau di masa terjadinya kemerosotan kehidupan sosial ekonomi.<sup>12</sup> Satu hal yang membedakan Tragedi Mei 1998 dengan huru-hara sebelumnya adalah kecanggihan teknologi modern. Anda bisa melihat apa yang terjadi di belahan bumi lain pada waktu yang bersamaan (apalagi jika secara *live broadcast*), sehingga anda menjadi *shock* disaat menyaksikan peristiwa tersebut. Seolah-oleh peristiwa itu benar-benar terjadi langsung di hadapan anda sehingga terasa mengguncang para pemirsanya.

Lebih lanjut saya ingin membahas Tragedi Mei 1998 dari sisi 'why did it happen'? Setidaknya ada dua sebab mengapa tragedi itu pecah, yakni (i) sebab yang berkembang sepanjang perjalanan sejarah dan (ii) faktor pemicu (*triggering factor*).<sup>13</sup> Secara singkat kedua sebab itu akan dijabarkan sebagai berikut.

### A. Sebab yang berkembang sepanjang perjalanan sejarah

<sup>12</sup> Masih bisa disebut juga aksi-aksi anti-Cina dalam dasawarsa 1960-an (Peristiwa 10 Mei 1963, G-30S), 1970-an (Malari) dan 1980-an (Huru-hara Solo Semarang). Sebelum Tragedi Mei 1998 terjadi pula kerusuhan di Rengasdengklok. Untuk huru-hara anti-Cina di tahun-tahun sekitar kejatuhan Orde Baru, lihat Jemma Purdey, *Anti-Chinese Violence in Indonesia 1996-1999* (Singapore: NUS Press, 2006). Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa pada tahun 1996 terjadi 3 kerusuhan anti-Cina, 1997 ada 8, 1998 ada 33 dan 1999 ada 3, dengan total keseluruhan 47 kerusuhan.

<sup>13</sup> Ester Indahyani Jusuf et al. menyebutnya sebagai faktor 'penyebab' dan 'pemicu'. 'Penyebab' adalah 'mengajak kita melihat lebih jauh dan komprehensif atas peristiwa yang terjadi', sedang "pemicu lebih mudah dilihat dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi menjelang atau bersamaan dengan terjadinya Kerusuhan Mei 1998", lihat *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa*, 2-3

## A.1 Kebencian pada Etnis Tionghoa, yang disebabkan oleh Politik *divide et impera* Belanda

Pemerintah kolonial Belanda menciptakan etnis Tionghoa sebagai *middleman minority* (minoritas perantara). Belanda yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, melihat bahwa Tionghoa bisa menjadi “perantara” antara mereka dengan golongan pribumi. Maka Belanda menjual berbagai macam *pacht* (hak pengelolaan) bagi jalan tol, candu, rumah gadai, kepada pengusaha Tionghoa. Para pengusaha tersebut berani membeli *pacht* dengan harga tinggi, karena mereka tahu bahwa keuntungan yang didapatkan akan berlipat ganda. Dengan dukungan penguasa, para *pachter* tersebut memeras rakyat dan menjadi sangat kaya karena kedudukannya. Etnis Tionghoa juga menjadi pedagang perantara, oleh karena rakyat yang berasal dari budaya petani ‘mengharamkan’ profesi yang berhubungan dengan uang. Dengan demikian pengusaha etnis Tionghoa dibenci –sekaligus dibutuhkan—rakyat, dan semakin dijauhkan dari rakyat, di pihak lain menjadi tergantung pada penguasa untuk mencari keamanan. Posisi sebagai minoritas perantara ini seakan “merantai kaki” etnis Tionghoa dari jaman ke jaman. Ia bagaikan buah simalakama: menghasilkan banyak keuntungan, namun amat rentan secara politis, khususnya di saat terjadi krisis.<sup>14</sup>

Kebijakan lain yang dibuat Belanda adalah *wijkenstelsel* (peraturan hukum yang mengharuskan etnis Tionghoa terkonsentrasi di pecinan) dan *passenstelsel* (peraturan hukum yang mewajibkan etnis Tionghoa untuk memohon surat jalan apabila bepergian di luar garis batas wilayah yang diijinkan). Kedua kebijakan ini berakibat amat fatal, karena menciptakan segregasi bagi etnis Tionghoa dan sekaligus mengasingkan mereka dari golongan masyarakat lainnya.

## A.2 Diskrepansi Ekonomi

Sebagai akibat kebijakan Belanda diatas, maka etnis Tionghoa secara ekonomis lebih maju dibanding dengan golongan pribumi Indonesia. Kita masih ingat menjelang Tragedi Mei 1998 muncul “tudingan’ atau ‘tuduhan’ berbagai pihak. Misalnya dari para akademisi Australia yang mengatakan bahwa ‘sebanyak 3% pengusaha etnis Tionghoa mampu menguasai 70% asset ekonomi Indonesia’.<sup>15</sup> Sungguh dampak dari pernyataan yang masih bisa diperdebatkan ini amat mengerikan.

---

<sup>14</sup> Lihat lebih lanjut Didi Kwartanada, ‘Perang Jawa (1825-1830) dan Implikasinya pada Hubungan Cina-Jawa’, Pengantar untuk Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), ix-xxxii

<sup>15</sup> Menurut penelusuran George Junus Aditjondro, pernyataan itu berawal dari tulisan Michael Backman, seorang peneliti pada *East Asia Analytical Unit* dari *Department of Foreign Affairs and Trade*, Australia. Backman bertanggung jawab atas buku terbitan lembaga tersebut *Overseas Chinese Business Networks* (Canberra: AGPS Press, Department of Foreign Affairs and Trade, 1995) yang memuat pernyataan yang kontroversial tersebut. Lihat Sie Hok Tjwan, “Dongeng tentang 3 % yang Menguasai 70 %”, *Indonesia Media* Agustus 2000, <http://www.indonesiamedia.com/rubrik/opini/opini00august.htm> (diakses 12 April 2008)

## **B. Faktor pemicu (*triggering factor*), diantaranya adalah**

### **B.1 Persaingan di kalangan elit politik**

### **B.2 Salah satu pihak yang bertikai “mengorbankan” etnis Tionghoa**

Saya tidak akan berpanjang lebar membahas kedua butir diatas, berhubung sudah demikian banyak tulisan yang dihasilkan, baik dari masing-masing pihak yang bertikai maupun dari pengamat yang berusaha melihat dengan lebih jernih.

Sampai disini saja saya membicarakan Tragedi Mei 1998 sebagai satu peristiwa di masa lalu, suatu topik yang sudah begitu banyak dibahas.<sup>16</sup> Janganlah lupa bahwa pada bulan Mei 2008 ini kita juga memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan di bulan Oktober 80 tahun Sumpah Pemuda. Marilah kita membahas hasil-hasil yang sudah dicapai dalam sepuluh tahun terakhir ini serta tantangan ke depan yang menanti etnis Tionghoa.

## **Berkah bagi Etnis Tionghoa: Pemulihan Hak Budaya beserta UU Kewarganegaran dan UU Adminduk (2006)**

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini banyak orang mengeluh bahwa Reformasi belum memberikan hasil yang nyata. Tentunya pendapat ini tidak seratus persen benar, karena misalnya dalam bidang politik sudah dicapai beberapa undang-undang yang akan membawa kebaikan bagi masa depan negara kita, misalnya pembatasan masa jabatan presiden, dll. Akan tetapi etnis Tionghoa hendaknya mengucap syukur karena adanya dua hal penting dan mendasar, yang bisa *‘serve for the best of Indonesia’*, yakni

### **1. Dipulihkannya Hak-hak Budaya Etnis Tionghoa**

Budaya adalah ‘roh’ suatu masyarakat, suatu etnis dan suatu bangsa. Dipulihkannya budaya Tionghoa telah membawa etnis Tionghoa menikmati kembali ‘roh-nya’ yang telah sempat lama hilang.

### **2. Diundangkannya Dua Undang-undang yang Sangat Penting di Tahun 2006.**

2.1. Undang-undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan

2.2. Undang-undang No.23, tertanggal 29 Desember 2006 tentang Adminduk (Administrasi Kependudukan).

---

<sup>16</sup> Ester Indahjani Jusuf dari Solidaritas Nusa Bangsa (Solidaritas Nusa Bangsa) serta Romo Sandiyawan Sumardi (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) adalah dua orang tokoh yang banyak menghasilkan investigasi mengenai Tragedi Mei 1998 serta mempresentasikan temuan mereka di Indonesia maupun dunia internasional.

Kedua UU tersebut adalah sangat penting, namun saya cenderung menyimpulkan bahwa UU Adminduk mempunyai dampak penting jangka panjang bagi etnis Tionghoa. Mengapa demikian?

Ijinkanlah saya memberikan pengandaian. Di jaman kolonial, Pemerintah Hindia Belanda memisah-misahkan rakyat Indonesia ke dalam empat golongan, bagaikan membuat empat loket terpisah. Masing-masing adalah untuk golongan Eropa, Indonesia Islam, Indonesia Kristen dan Timur Asing (khususnya Tionghoa). Maka tidaklah heran apabila diskriminasi atas Tionghoa tidak bisa hilang. Petugas bisa langsung tahu, bahwa si A, si B ini keturunan Tionghoa, karena mereka menggunakan loket khusus Tionghoa. Akan tetapi dengan UU No.23 (2006) hanya ada satu “loket” tanpa sekat-sekat antar golongan, semua diperlakukan sama. Untuk itu, etnis Tionghoa harus berterimakasih karena kedua UU itu penting sekali demi keadilan di masa depan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini menegaskan kembali bahwa etnis Tionghoa adalah komponen bangsa Indonesia seperti halnya dengan etnis-etnis lainnya. Di masa lalu paham kebangsaan yang dianut Indonesia adalah paham ETNONASIONALISME, paham kebangsaan berdasarkan ras. Orang Indonesia “asli” adalah mereka yang disebut “pribumi”, sedangkan etnis Tionghoa dianggap orang luar (*outsider*). Namun kini yang dianut negara kita adalah paham NASIONALISME MODERN, yang tidak lagi berdasarkan ras, namun kesamaan cita-cita untuk membangun Indonesia.

Dari pengalaman tahun 2004, undang-undang yang kita miliki sudah baik, namun Undang Undang Dasar masih belum demikian. Contohnya adalah

- a. Pasal 6 UUD: ‘Presiden adalah orang Indonesia ‘asli’. Namun pasal ini sudah diganti di tahun 2004, jadi siapa saja WNI bisa menjadi Presiden. Dengan demikian secara teoretis, Tionghoa pun bisa menjadi Presiden.
- b. Yang lebih parah adalah Pasal 26 UUD: “Warga Negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan mereka yang di-warganegara-kan”. Hingga tahun 2006 bunyi pasal ini belum diubah.

Ada anekdot mengenai Pasal 26 UUD dari tahun 2004, pada saat diadakan penggodogan draft UU Kewarganegaraan. Pada saat disodori draft tersebut, saya berkomentar bahwa “anak” (draft UU Kewarganegaraan) ini sudah baik, namun “bapak” (Pasal 26 UUD 1945) masih belum, karena masih belum direvisi. Secara singkat, ada pasal dalam batang tubuh UU Kewarganegaraan yang sama dengan pasal 26 UUD 1945. Mendengar hal itu seorang anggota DPR, Patrialis Akbar, mengatakan pada saya, supaya melihat pada bagian penjelasan mengenai siapa warga negara Indonesia. Menurutnya Disana ada perkembangan yang menggembirakan, yakni yang disebut bangsa Indonesia asli adalah semua orang yang lahir di negeri ini dan tidak mengambil kewarganegaraan negara lain.

Saya penasaran dan membeli tiga buku UUD terbaru, namun dalam penjelasan pasal 26, ternyata masih sama bernada diskriminatif. Jadi saya waktu itu merasa seolah 'dikibulin' oleh Patrialis. Barulah kemudian setelah UU Kewarganegaraan diundangkan di tahun 2006, pada bagian penjelasan ditemukanlah apa yang dimaksud oleh Patrialis tadi. Rupanya waktu beliau mengatakan hal tersebut pada saya, UU Kewarganegaraan belum disahkan, termasuk bagian penjelasannya yang kita permasalahan disini. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Patrialis dan menceritakan kisah ini yang disambut dengan derai tawa oleh yang bersangkutan.

Meskipun dalam prakteknya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa belum lagi seratus persen berakhir, namun pada taraf perkembangan yang sudah demikian baik ini, barangkali bijaksana kalau kita ingat dan ambil parallelisme dari ucapan alm. Presiden AS, John F. Kennedy yang terkenal: *'ask not what the country should do for you, but ask what you can do for the country'*. Etnis Tionghoa hendaknya menyadari sepenuhnya makna kata-kata bijak dari negarawan tersebut. Dua UU diatas adalah berkah, suatu 'kado besar' dan hendaknya kita membalas budi baik Ibu Pertiwi. Untuk orang Tionghoa, sudah waktunya secara satria dan konsekuen tidak boleh ragu dan malu untuk mengatakan 'saya adalah orang Indonesia' dengan segala konsekuensinya, termasuk memikul tanggung jawab pada Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Setelah membahas 'berkah' Reformasi yang kita terima, marilah kita melihat situasi Indonesia masa kini secara keseluruhan, yang merupakan 'tantangan' bagi kita semua.

### **Situasi Ekonomi dan Dampak Perkembangan Global pada Indonesia Dewasa Ini**

Secara makro ekonomi Indonesia pada dasawarsa Reformasi ini membaik. Indonesia kini memiliki cadangan devisa sejumlah 60 milyar USD, disamping ekspor meningkat dua kali lipat dibanding sebelum krismon. USD stabil, inflasi tidak menggila.

Namun di sisi lain, pada kenyataannya kesenjangan kaya-miskin makin sangat melebar. Dengan definisi 'orang kaya' sebagai mereka yang kekayaannya lebih dari 1 juta USD (*High Net Worth Individual* disingkat HNWI),<sup>17</sup> maka ternyata secara global pada tahun 2005-2006, jumlah orang yang bertambah kaya dari Indonesia duduk di urutan ke-3 setelah Singapura dan India. Adapun perinciannya ada dalam tabel 2.

---

<sup>17</sup> Fred Marishel, *The Affluent Australian: A White Paper Prepared by Fred Marishel* (Financial Pursuit 2007), 5

**Tabel 2. Pertumbuhan HNWI pada Pasar Terpilih, 2005-2006**

No	Negara	Pertumbuhan HNWI (dalam %)	Jumlah HNWI
1	Singapura	21, 2	67,000
2	India	20,5	100,000
<b>3</b>	<b>Indonesia</b>	<b>16</b>	<b>20,000</b>
4	Russia	15,5	119,000
5	Uni Emirat Arab	15,4	68,000
6	Korea Selatan	14,1	99,000
7	Afrika Selatan	13,3	48,000
8	Israel	12,9	7,000
9	Republik Czech	12,6	15,000
10	Hong Kong	12, 2	87,000

Sumber: Fred Marishel, *The Affluent Australian: A White Paper Prepared by Fred Marishel* (Financial Pursuit 2007), 8

Namun apa yang terjadi di balik fenomena spektakuler 16% pertumbuhan orang kaya tersebut? Rupanya gambaran sesungguhnya tidaklah segemerlap yang nampak. Sebelum RRT bangkit, Indonesia adalah salah satu eksportir tekstil terbesar dengan jutaan buruh. Industri elektronik dan sepatu juga demikian. Namun semuanya itu kini ambles. Kini yang makin kaya adalah pengusaha kelapa sawit, tambang dan mineral, batubara serta minyak dan gas alam. Dengan kata lain hanya segilintir orang saja yang menjadi sangat kaya. Pengolahan industri kelapa sawit dan batubara itu bukanlah industri padat karya, karena menggunakan mesin-mesin (traktor, dll). Dengan demikian buruh-buruh tidak tertampung. Kemana mereka harus mencari makan dan menghidupi keluarganya? Bencana alam datang bertubi-tubi, seakan tidak ada hentinya. Yang lebih menyedihkan lagi, korupsi juga sulit sekali diberantas sehingga merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Pemerintah kita belum terbukti memiliki visi jauh ke depan. Kebanyakan hanya pemikiran jangka pendek saja. Baru saja Indonesia mengalami krisis kedelai dan tempe, makanan yang dikonsumsi semua kalangan, baik dari kaum elit hingga rakyat kecil. Rupanya di waktu dulu saat kita repot-repot menanam kedelai, ternyata Amerika Serikat mampu menyediakan kedelai murah. Lalu mengapa bersusah-payah menanam kedelai, kalau ada yang menjualnya dengan murah? Ternyata begitu ada perubahan mendadak seperti yang baru saja kita alami, harga kedelai naik drastis dan mematikan banyak pengusaha tahu tempe. Akhirnya kita semua kehilangan satu jenis makanan yang sehat dengan harga terjangkau.

Situasi ini tidak lepas dari pengaruh harga minyak dunia. Sebelum tahun 1970-an harga minyak per barrel adalah 6 USD, sekarang mencapai 110 USD dan masih terus meroket. Akhirnya diciptakanlah *Biofuel*, dimana teknologi bisa mengubah bahan makanan seperti jagung, gandum dan kacang-kacangan menjadi bahan bakar yang lebih murah dan baik untuk lingkungan. Namun di pihak lain, hewan ternak seperti sapi juga makan jagung. Terjadilah 'perebutan' sumber makanan antara mesin dengan manusia dan hewan ternak. Akhirnya harga jagung, kedelai, minyak goreng semakin mahal. Dampak krisis global serta kurangnya visi pemerintah membawa akibat langsung bagi Indonesia, khususnya atas kehidupan rakyat kecil.

### **Tantangan: Situasi Kini Bagaikan Alang-alang Kering**

Bagi saya situasi sekarang ini laksana kita hidup ditengah-tengah ladang alang-alang yang mengering. Setiap saat bila ada yang menyulut, kebakaran besar sungguh bisa berkobar! Di balik gemerlapnya angka pertumbuhan dan bertambahnya jumlah orang kaya, tersimpan banyak sekali tragedi kehidupan yang menimpa rakyat Indonesia kebanyakan. Kita baca bagaimana seorang ibu hamil yang mati kelaparan dengan seorang anaknya di Makassar. Ada pula ibu yang meninggalkan anaknya di jalanan. Yang paling tragis adalah ibu-ibu yang membunuh anak-anak kandung mereka dengan tangan sendiri. Alasannya adalah mereka tidak mampu lagi untuk memberi makan dan kehidupan bagi buah hatinya. Bila ibu-ibu sebagai tiang penyangga kelangsungan keluarga sudah mulai kehilangan hati nuraninya, berarti negara sudah gagal menjalankan tugasnya sebagai pengayom rakyatnya. Kegagalan juga ditunjukkan dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dari hari ke hari. Rakyat kecil yang harus berdesak-desakan membeli minyak tanah atau minyak goreng adalah pemandangan yang senantiasa muncul di media massa.

### **Penutup: Prospek dan Gagasan**

Ijinkanlah saya menyimpulkan kembali butir-butir yang telah dibahas diatas. Terdapat dua 'berkah' yang sudah diperoleh dalam sepuluh tahun terakhir ini, yakni (1) Dipulihkannya kembali hak-hak budaya etnis Tionghoa, sekaligus keberadaan mereka diakui secara hukum; (2) UU Kewarganegaraan dan UU Adminduk adalah amat penting bagi etnis Tionghoa. Namun di pihak lain terdapat pula dua 'tantangan besar' bagi etnis Tionghoa, yakni (1) Jurang kaya-miskin makin hari makin melebar; (2) Masyarakat miskin telah menjadi 'rumput kering' yang gampang disulut untuk menjadi anti-Tionghoa. Sejarah telah menunjukkan bahwa di saat pergantian rezim dan kesulitan ekonomi, etnis Tionghoa senantiasa diposisikan sebagai 'kambing hitam' yang harus bertanggung jawab atas segala keterpurukan yang terjadi. Ini semua tentu tidak kita kehendaki untuk terjadi.

Apakah Tragedi Mei 1998 bisa terulang kembali? Tidak tertutup kemungkinan ke arah itu, karena situasi Indonesia saat ini sudah *'on the brink of the danger'*. Apa yang

bisa kita perbuat selaku etnis Tionghoa untuk mencegahnya? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan:

1. Harus sadar dan mau mengakui bahwa saat ini keadaan sudah begitu kritis.
2. Merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan

Saya ingin kembali menyerukan, bahwa dengan adanya dua berkah di atas etnis Tionghoa hendaknya berlatih untuk mulai berpikir sebagai orang Indonesia. Oleh karena kita semua adalah orang Indonesia, maka masalah Tionghoa tidak lagi menjadi masalah eksklusif golongan Tionghoa saja, namun masalah nasional, masalah kita bersama. Janganlah mengurus semua permasalahan yang menyangkut etnis Tionghoa ini sebagai golongan Tionghoa. Kita harus merangkul dan bergandeng tangan dengan komponen-komponen bangsa lainnya, baik kalangan agama dan kelompok LSM untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Marilah secara berangsur-angsur kita menjadi orang Indonesia seutuhnya, karena masalah Tionghoa adalah masalah Indonesia juga, masalah kita semua.

Kembali pada tema kita “Menuju Indonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi”. Bagaimanakah prospek tema tersebut akan tercapai? Saya optimis seratus persen bisa berhasil. Seperti di atas sudah dikatakan bahwa bergandengan tangan dengan komponen bangsa lainnya, etnis Tionghoa mesti bisa merumuskan kebijakan kesejahteraan yang lebih merata. Disinilah etnis Tionghoa bisa memainkan peranan yang menentukan melalui penyerbukan silang budaya (*cross cultural fertilization*). Orang Tionghoa bukan hanya mengambil nilai-nilai lokal, namun mereka misalnya bisa membagikan ketrampilan manajemen dalam kewiraswastaan. Upaya lainnya adalah memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan serta mengupayakan terciptanya ekonomi yang adil, serta bebas dari korupsi. Insya allah, dengan semua upaya tadi akan tercipta Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi yang kita semua dambakan di masa depan.

Akhirnya, saya mengajak etnis Tionghoa untuk mencapai status yang lebih baik dan menjadi Warga Negara Indonesia sejati. Marilah kita jangan hanya mengurus masalah Tionghoa semata, namun juga membuka mata dan hati kita pada masalah bangsa kita secara keseluruhan, tanpa sekat-sekat.

Terimakasih atas undangan yang diberikan kepada saya dan semoga uraian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.